



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah.....	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	43
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	43
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	52



3.3. Program Dan Kegiatan	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	
	81
BAB V PENUTUP	82



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matrik Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Periode Pelaksanaan : Tahun 2023	11
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu	22
Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Kapuas Hulu.....	28
Tabel 4 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Kapuas Hulu	39
Tabel 5 Rumusan Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025	55



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nomor 113 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tersebut, Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, yang merupakan Dokumen Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan harapan dapat mengoptimalkan hasil kinerja aparatur yang profesional dan



akuntabel sejalan dengan visi, misi, tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Sejalan dengan reformasi disegala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan dibidang manajemen pemerintahan, Hal tersebut antara lain diwujudkan dalam :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);



4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) Sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomr 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor



- 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyeleggaran Pemerintah Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran



Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah



- Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 -2026;
25. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;



1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 memuat berbagai program prioritas pembangunan infrastruktur yang merupakan dokumen pembangunan untuk Tahun Anggaran 2024.

Tujuan Renja yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah “sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan”. Rencana Kerja dimaksud adalah sebagai pedoman dan bahan pembahasan untuk dijadikan RKPD Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk melihat hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, lebih jelas dapat di lihat dalam Tabel dibawah ini :



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

Tabel 1
Matrik Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Periode Pelaksanaan : Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Berjalan (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab
												I		II		III		IV								
												2022		2023												
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6*100		16
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	MENINGKATKAN IMPLEMENTASI PELAKSANAAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI (RB) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	(%)	100,00	12.474.620.184,00	99,04	28.336.268.682,00	100,00	18.880.348.281,00	16,82	3.175.505.514,00	25,37	4.790.458.201,00	23,24	4.387.292.355,00	26,44	4.991.491.385,00	91,87	17.344.792.455,00	95,45	45.681.061.137,00	95,45	366,19	DPUPR



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

	RUANG																									
2	-	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(%)	100,00	89.550.000,00	100,00	113.729.700,00	100,00	51.390.000,00	0,00	0,00	0,00	52,13	26.790.000,00	46,60	23.950.000,00	98,74	50.740.000,00	99,37	164.469.700,00	99,37	183,66	DPUPR	
3	-	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(%)	100,00	9.351.518.550,00	99,54	12.041.380.524,00	100,00	8.944.085.951,00	1,823	1.630.760.095,00	2,904	2.597.130.283,00	2,011	1.798.978.051,00	19,31	1.727.355.405,00	86,70	7.754.223.834,00	93,12	19.795.604.358,00	93,12	211,68	DPUPR
4	-	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peresentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	(%)	100,00	21.725.000,00	100,00	22.296.700,00	100,00	67.125.000,00	0,00	0,00	0,00	63,84	42.850.000,00	35,01	23.500.000,00	98,85	66.350.000,00	99,42	88.646.700,00	99,42	408,04	DPUPR	
5	-	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian	(%)	100,00	625.450.000,00	92,51	442.227.319,00	100,00	592.692.000,00	1,60	9.501.500,00	1,40	85.370.133,00	2,315	137.189.549,00	36,21	214.617.600,00	75,36	446.678.782,00	83,94	888.906.101,00	83,94	142,12	DPUPR



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

				Perangkat Daerah																						
6	-	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	(%)	100,00	3.631.072.200,00	98,14	6.163.156.116,00	100,00	3.455.693.500,00	11,64	402.295.525,00	18,55	641.190.954,00	30,37	1.049.391.924,00	37,46	1.294.525.478,00	98,02	3.387.403.881,00	98,08	9.550.559.997,00	98,08	263,02	DPUPR
7	-	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	(%)	100,00	4.853.385.318,00	97,84	1.004.600.000,00	100,00	170.400.000,00	0,00	0,00	96,86	165.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	165.045.000,00	97,35	1.169.645.000,00	97,35	24,10	DPUPR
8	-	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(%)	100,00	4.818.285.600,00	99,56	6.636.979.692,00	100,00	4.446.477.860,00	22,52	1.001.550.224,00	23,75	1.056.006.173,00	26,53	1.179.584.681,00	25,46	1.132.140.450,00	98,26	4.369.281.528,00	98,91	11.006.261.220,00	98,91	228,43	DPUPR
9	-	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(%)	100,00	1.558.253.700,00	99,83	1.911.898.631,00	100,00	1.152.483.970,00	11,41	131.443.170,00	21,32	245.715.658,00	13,23	152.508.150,00	49,93	575.402.452,00	95,89	1.105.069.430,00	97,86	3.016.968.061,00	97,86	193,61	DPUPR
10	MENINGKATKAN KETERSEDIAAN AIR	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	(%)	85,40	2.491.991.600,00	72,28	8.476.705.423,00	1,26	1.341.697.600,00	0,00	90.155.000,00	0,00	138.050.000,00	0,00	197.735.000,00	1,55	915.027.610,00	1,55	1.340.967.610,00	73,83	9.817.673.033,00	86,45	393,97	DPUPR



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

	UNTUK IRIGAS I																									
1 1	-	1.03. 02.2. 01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang garis sungai rawan abrasi	(M)	300 ,00	4.983.98 3.200,00	489 ,54	1.630.47 1.844,00	28, 00	521.470. 240,00	0, 0 0	0,00	0, 0 0	0,00	0, 0 0	0,00	32, 00	521.009 .400,00	32, 00	521.009. 400,00	521 ,54	2.151.48 1.244,00	17 3, 85	43, 17	DPUPR
1 2	-	1.03. 02.2. 02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Jaringan Irigasi yang direhabilitasi/dipelihara	(Ha)	250 ,00	0,00	220 ,09	6.846.23 3.579,00	92, 96	820.227. 360,00	0, 0 0	90.155. 000,00	0, 0 0	138.050 .000,00	0, 0 0	197.735 .000,00	95, 26	394.018 .210,00	95, 26	819.958. 210,00	315 ,35	7.666.19 1.789,00	12 6, 14	0,0 0	DPUPR
1 3	MENINGKATKAN LAYANAN AKSES RUMAH TANGGA DENGAN AKSES AIR MINUM LAYAK	1.03. 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum	(%)	85, 40	12.432.0 03.212,7 4	56, 73	19.733.0 98.750,0 0	0,0 7	8.800.37 9.000,00	0, 0 0	76.020. 000,00	0, 0 0	2.121.6 44.750, 00	0, 0 0	3.704.4 95.550, 00	0,7 7	2.879.4 53.950, 00	0,7 7	8.781.61 4.250,00	57, 50	28.514.7 13.000,0 0	67 ,3 3	229 ,37	DPUPR



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

14	-	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Akses Air Bersih Yang Dibangun Dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	(SR)	1.780,00	24.864.006.425,48	4.429,00	19.733.098.750,00	1.478,00	8.800.379.000,00	0,00	76.020.000,00	0,00	2.121.644.750,00	0,00	3.704.495.550,00	1.515,00	2.879.453.950,00	1.515,00	8.781.614.250,00	5.944,00	28.514.713.000,00	333,93	114,68	DPUPR
15	-	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Pengelolaan Sampahan	(%)	0,03	975.081.961,31	0,00	1.327.224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.224.500,00	0,00	136,11	DPUPR
16	-	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Yang Dibangun Dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	(KK)	400,00	1.950.163.922,62	667,00	1.327.224.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	1.327.224.500,00	166,75	68,06	DPUPR
17	MENINGKATKAN AKSES SANITASI LAYAK	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah	(%)	75,80	3.236.193.200,00	45,73	4.391.766.900,00	0,07	5.247.846.000,00	0,00	11.605.000,00	0,00	1.335.19.300,00	0,00	2.228.491.800,00	2,77	1.600.115.350,00	2,77	5.175.331.450,00	48,50	9.567.098.350,00	63,98	295,63	DPUPR



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

				Domestik																						
18	-	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	(K K)	460,00	6.472.386.400,00	420,00	4.391.766.900,00	519,00	5.247.846.000,00	0,00	11.605.000,00	0,00	1.335.19.300,00	0,00	2.228.491.800,00	519,00	1.600.15.350,00	519,00	5.175.331.450,00	939,00	9.567.098.350,00	204,13	147,81	DPUPR
19	-	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Genangan Air Yang Ditangani	(%)	15,18	750.000.000,00	4,21	1.029.302.190,00	3,29	1.019.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	1.019.936.000,00	5,81	1.019.936.000,00	10,02	2.049.238.190,00	66,01	273,23	DPUPR	
20	-	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang dibangun	(M)	900,00	1.500.000.000,00	910,00	1.029.302.190,00	610,14	1.019.936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,65	1.019.936.000,00	862,65	1.019.936.000,00	1.772,65	2.049.238.190,00	196,96	136,62	DPUPR	
21	-	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Penertiban IMB Yang Sesuai Dengan Peruntukannya	(%)	100,00	1.303.231.500,00	99,57	64.365.250.014,00	100,00	58.162.986.378,00	4,113	23.920.840.854,00	1,957	11.381.685.236,00	0,73	426.938.730,00	38,20	22.217.858.488,00	99,63	57.947.323.308,00	99,60	122.312.573.322,00	99,60	9,385,33	DPUPR



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

22	-	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio bangunan yang memiliki IMB di Daerah Kabupaten/Kota	(%)	14,00	2.606.463.000,00	9,52	64.365.250.014,00	0,48	58.162.986.378,00	0,00	23.920.840.854,00	0,00	11.381.685.236,00	0,00	426.938.730,00	0,59	22.217.858.488,00	0,59	57.947.323.308,00	10,11	122.312.573.322,00	72,24	4.692,66	DPUPR
23	-	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Jumlah Titik Lokasi Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan	(Titik Lokasi)	170,00	11.692.601.200,00	186,00	26.689.526.446,00	122,00	17.794.700.024,00	1,00	127.215.000,00	2,00	649.823.000,00	12,00	2.410.460.180,00	107,00	14.566.313.213,00	122,00	17.753.811.393,00	308,00	44.443.337.839,00	18,18	380,10	DPUPR
24	-	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Titik Lokasi yang mendapat intervensi penataan bangunan dan lingkungan.	(Titik Lokasi)	170,00	23.385.202.400,00	186,00	26.689.526.446,00	122,00	17.794.700.024,00	1,00	127.215.000,00	2,00	649.823.000,00	12,00	2.410.460.180,00	107,00	14.566.313.213,00	122,00	17.753.811.393,00	308,00	44.443.337.839,00	18,18	190,05	DPUPR
25	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN JEMBATAN	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten/Kondisi Mantap	(%)	79,00	130.245.632.500,00	67,10	215.890.217.976,00	0,90	118.993.444.620,00	0,00	238.310.000,00	0,00	3.013.835.845,00	0,00	18.718.182.885,00	0,98	96.632.895.229,00	0,98	118.603.223.959,00	68,08	334.493.441.935,00	86,18	256,82	DPUPR



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

26	-	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan terbangun /ditangani	(KM)	0,00	260.491.265.000,00	107,01	215.890.217.976,00	12,00	118.993.444.620,00	0,00	238.310.000,00	0,00	3.013.835.845,00	0,00	18.718.182.885,00	38,17	96.632.895.229,00	38,17	118.603.223.959,00	145,18	334.493.441.935,00	0,00	128,41	DPUPR
27	MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASAKONSTRUKSI	Score Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Jasa Konstruksi	(Score)	82,00	4.909.390.651,50	81,48	1.290.318.850,00	0,52	598.685.800,00	0,00	19.230.000,00	0,00	82.485.000,00	0,00	202.518.000,00	0,52	273.861.000,00	0,52	578.094.000,00	82,00	1.868.412.850,00	10,00	38,06	DPUPR
28	-	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	(%)	100,00	339.141.196,00	94,82	106.586.000,00	100,00	52.525.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	22.185.000,00	55,97	29.400.000,00	98,21	51.585.000,00	96,51	158.171.000,00	96,51	46,64	DPUPR
29	-	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	(%)	100,00	8.400.000.000,00	70,83	11.900.000,00	100,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.900.000,00	100,00	4.900.000,00	85,42	16.800.000,00	85,42	0,20	DPUPR
30	-	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	(%)	100,00	129.820.000,00	95,38	174.852.000,00	100,00	41.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89	31.320.000,00	74,89	31.320.000,00	85,14	206.172.000,00	85,14	158,81	DPUPR
31	-	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Ter	(%)	100,00	949.820.107,00	95,55	996.980.850,00	100,00	499.440.000,00	3,85	19.230.000,00	1,65	82.485.000,00	3,61	180.333.000,00	41,69	208.241.000,00	98,17	490.289.000,00	96,86	1.487.269.850,00	96,86	156,58	DPUPR



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

			Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	tib Penyelengaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi									2		1											
32	MENINGKATKAN KETAATAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	(%)	39,13	1.270.000,00	4,35	969.856.345,00	4,74	664.096.000,00	0,00	75.825.000,00	0,00	64.135.000,00	0,00	50.610.000,00	0,00	412.461.000,00	0,00	603.031.000,00	4,35	1.572.887.345,00	11,12	123,85	DPUPR
33	-	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan RRTR yang ditetapkan	(Dok.)	1,00	820.000.000,00	0,00	319.533.245,00	0,00	161.846.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.246.000,00	0,00	159.246.000,00	0,00	478.779.245,00	0,00	58,39	DPUPR	
34	-	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	(Dok.)	5,00	400.000.000,00	0,00	423.288.300,00	1,00	142.400.000,00	0,00	0,00	0,00	37.950.000,00	0,00	11.990.000,00	1,00	46.640.000,00	1,00	96.580.000,00	1,00	519.868.300,00	20,00	129,97	DPUPR
35	-	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi	(Dok.)	1,00	380.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DPUPR	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

			Daerah Kabupaten/Kota	asi Pemanfaat an Ruang Daerah Kabupate n/Kota																						
3 6	-	1.03. 12.2. 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaat an Ruang Daerah Kabupate n/Kota	(D ok.)	1,0 0	940.000. 000,00	0,0 0	227.034. 800,00	1,0 0	359.850. 000,00	0, 0 0	75.825. 000,00	0, 0 0	26.185. 000,00	0, 0 0	38.620. 000,00	1,0 0	206.575 .000,00	1,0 0	347.205. 000,00	1,0 0	574.239. 800,00	10 0, 00	61, 09	DPUPR
											Rata- rata Capaian Kinerja (%)									10 5,3 5	98,98					
											Predika t Kinerja									ST	ST					



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini :



Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu

NO	Indikator Kinerja		SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan analisis
					Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (thn n)	Tahun (thn n+1)	
					2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	(%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	99,04	95,45	100,00	100,00	
2	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,37	100,00	100,00	
3	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	99,54	93,12	100,00	100,00	
4	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	(%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,42	100,00	100,00	
5	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	92,51	83,94	100,00	100,00	
6	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	(%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	98,14	98,08	100,00	100,00	
7	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	(%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	97,84	97,35	100,00	100,00	
8	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	99,56	98,91	100,00	100,00	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

9	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah	(%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	99,83	97,86	100,00	100,00	
10	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	(%)	-	-	71,04	73,54	76,04	78,54	72,28	73,83	74,61	76,87	
11	Panjang garis sungai rawan abrasi	(M)	-	-	1.137,00	1.385,00	1.685,00	1.985,00	489,54	521,54	6.869,72	16.075,87	
12	Luas Jaringan Irigasi yang direhabilitasi/dipelihara	(Ha)	-	-	470,90	720,90	970,90	1.220,90	220,09	315,35	749,05	985,63	
13	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum	(%)	-	-	85,00	85,10	85,20	85,30	56,73	57,50	85,14	85,23	
14	Jumlah Sarana dan Prasarana Akses Air Bersih Yang Dibangun Dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	(SR)	-	-	2.600,00	4.020,00	5.560,00	7.220,00	4.429,00	5.944,00	4.234,09	5.676,59	
15	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Pengelolaan Persampahan	(%)	-	-	0,02	0,02	0,02	0,03	0,00	0,00	0,02	0,02	
16	Jumlah Sarana dan Prasarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Yang Dibangun Dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	(KK)	-	-	0,04	0,07	0,09	0,12	667,00	667,00	0,07	0,09	
17	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	(%)	-	-	75,40	75,50	75,60	75,70	45,73	48,50	75,53	75,62	
18	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	(KK)	-	-	840,00	1.270,00	1.710,00	2.160,00	420,00	939,00	1.319,46	1.728,46	
19	Persentase Luas Genangan Air Yang Ditangani	(%)	-	-	3,18	6,18	9,18	12,18	4,21	10,02	17,21	38,42	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

20	Panjang saluran drainase yang dibangun	(M)	-	-	807,00	1.757,00	2.643,00	3.493,00	910,00	1.772,65	2.324,16	3.873,11	
21	Persentase Jumlah Penertiban IMB Yang Sesuai Dengan Peruntukannya	(%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	99,57	99,60	100,00	100,00	
22	Rasio bangunan yang memiliki PBG di Daerah Kabupaten/Kota	(%)	-	-	10,00	11,00	12,00	13,00	9,52	10,11	11,48	12,36	
23	Jumlah Titik Lokasi Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan	(Titik Lokasi)	-	-	290,00	445,00	605,00	770,00	186,00	308,00	464,39	614,85	
24	Titik Lokasi yang mendapat intervensi penataan bangunan dan lingkungan.	(Titik Lokasi)	-	-	290,00	445,00	605,00	770,00	186,00	308,00	464,39	614,85	
25	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	(%)	-	-	67,00	68,00	73,00	76,00	67,10	68,08	70,72	73,52	
26	Panjang jalan terbangun/ditangani	(KM)	-	-	80,26	124,26	168,26	212,26	107,01	145,18	129,60	171,84	
27	Score Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Jasa Konstruksi	(Score)	-	-	80,00	80,50	81,00	81,50	81,48	82,00	82,05	82,28	
28	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	(%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	94,82	96,51	100,00	100,00	
29	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	(%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	70,83	85,42	100,00	100,00	
30	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	(%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	95,38	85,14	100,00	100,00	
31	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	(%)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	95,55	96,86	100,00	100,00	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

32	Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	(%)	-	-	4,35	8,70	13,05	21,74	4,35	4,35	11,31	18,35	
33	Jumlah dokumen RTRW dan RRTR yang di tetapkan	(Dok.)	-	-	2,00	3,00	4,00	5,00	0,00	0,00	3,10	4,03	
34	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	(Dok.)	-	-	4,00	9,00	14,00	19,00	0,00	1,00	9,85	14,21	
35	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	(Dok.)	-	-	0,00	5,00	10,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	(Dok.)	-	-	2,00	3,00	4,00	5,00	0,00	1,00	3,10	4,03	



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Hasil review terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan SKPD yaitu :

- 1) Gambaran Pelayanan SKPD;
- 2) Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
- 3) Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 Pada K / L;
- 4) Sasaran Jangka Menengah dari Renstra SKPD Provinsi / Kabupaten / Kota dan;
- 5) Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD.

Maka ditentukan Isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Wilayah Yang Luas

Luasnya wilayah kabupaten Kapuas Hulu yang harus dilayani oleh jalan kabupaten, sehingga tidak semua daerah dapat dilaksanakan pembangunannya.

2. Kondisi Geografis

Kondisi geografis daerah membuat biaya pembangunan jalan menjadi tinggi, sehingga diperlukan dana yang besar



untuk dapat melaksanakan pembangunan jalan kabupaten.

3. Drainase di Perkotaan Belum Optimal

Masih minimnya prasarana saluran drainase/gorong-gorong perkotaan yang mengakibatkan adanya genangan air di beberapa tempat di wilayah perkotaan, sehingga pembangunan prasarana saluran drainase/gorong-gorong perlu dilakukan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD, dapat dilihat didalam dibawah ini :



Tabel 3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rancangan Awal Renja tahun 2023			Hasil Analisis Kebutuhan (Rancangan Akhir Renja) tahun 2023			Catatan Penting
			Capaian/ Hasil/ Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Capaian/ Hasil/ Keluaran	Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Predikat Reformasi Birokrasi (RB)		653.364.548.685			247.133.440.946		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		20.384.934.560			21.096.340.036		
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		89.550.000			89.550.000		
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENSTRA, RENJA, RKT, PKT, IKU, SOP, RB, SAKIP)		25.250.000		0 Dokumen	25.250.000	DAU	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD		9.750.000		0 Dokumen	9.750.000	DAU	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD		7.500.000		0 Dokumen	7.500.000	DAU	
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD		9.750.000		0 Dokumen	9.750.000	DAU	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD		7.500.000		0 Dokumen	7.500.000	DAU	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD LAKIP (LAPORAN KINERJA), PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN		4.550.000		0 Laporan	4.550.000	DAU	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD, RFK-O, Monev Pengukuran Kinerja, Monev Kemajuan Fisik)		25.250.000		0 Laporan	25.250.000	DAU	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		9.303.852.650			8.670.253.880		
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		7.588.918.550		0 Orang/bula	6.987.523.880	DAU	
1.03.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		41.700.000		0 Dokumen	10.000.000	DAU	
1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terwujudnya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Tahun	1.602.184.400	DAU	1 Tahun	1.601.880.000	DAU	
1.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	16.999.700		1 Dokumen	16.800.000	DAU	
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		20.300.000		0 Laporan	20.300.000	DAU	
1.03.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		8.000.000	DAU	0 Dokumen	8.000.000	DAU	
1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	25.750.000		0 Laporan	25.750.000	DAU	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peresentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		21.725.000			21.725.000		
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		21.725.000		0 Laporan	21.725.000	DAU	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		625.450.000			717.718.000		
1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				80 Stel 0 Paket	162.000.000	DAU	
1.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		25.450.000		0 Dokumen	25.450.000	DAU	
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 Orang	600.000.000	DAU	0 Orang	530.268.000	DAU	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.820.217.200			3.761.780.600		
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Paket	50.925.000	DAU	0 Paket	56.985.000	DAU	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		394.992.000		0 Paket	495.000.000	DAU	
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0 Paket	40.608.200	DAU	0 Paket			
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		84.990.000		0 Paket			
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0 Dokumen	84.976.000	DAU	0 Dokumen			
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	3.142.691.000	DAU	1 Tahun			
1.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		21.035.000		0 Dokumen			



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		90.000.000					
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit	90.000.000	DAU	0 Unit			
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.722.079.660					
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		20.170.000		0 Laporan			
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0 Laporan	333.501.100	DAU	0 Laporan			
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0 Laporan	4.368.408.560	DAU	0 Laporan			
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.712.060.050					
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0 Unit	1.625.760.050	DAU	0 Unit			
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit	86.300.000	Dana Transfer	0 Unit			
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik		51.053.530.000			2.463.350.000		
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang garis sungai rawan abrasi		40.452.480.000			568.000.000		
1.03.02.2.01.35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	7 Paket	40.452.480.000	DAU	7 Paket	478.000.000	DAU	
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai				DAU	0 KM		DAU	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

		-					90.000.000		
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Jaringan Irigasi yang direhabilitasi/dipelihara		10.601.050.000			1.895.350.000		
1.03.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	-		10.601.050.000	DAU	3 Dokumen	100.000.000	DAU	
1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun			DAU				
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan			DAU	0 KM	270.000.000	DAU	
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi			DAU	0 KM	1.425.350.000	DAU	
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara			DAU	0 KM	100.000.000	DAU	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum		67.072.330.000			24.160.540.000		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Akses Air Bersih Yang Dibangun Dalam Kondisi Baik dan Berfungsi		67.072.330.000			24.160.540.000		
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Sarana dan Prasarana Akses Air Bersih yang dibangun dalam kondisi baik dan berfungsi	0 Dokumen	504.980.000	DAU	0 Dokumen	186.548.000	DAU	
1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Dokumen Pengawasan dalam setahun	2 Kegiatan 0 Dokumen	137.500.000	DAU	2 Kegiatan 0 Dokumen	40.000.000	DAU	
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Akses Air Bersih yang dibangun dalam Kondisi Baik dan Berfungsi dalam tahun	0 SR 3 Paket	27.799.875.000	DAU	0 SR 3 Paket	1.852.485.000	DAU	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

		eksisting							
1.03.03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Akses Air Bersih yang dibangun dalam Kondisi Baik dan Berfungsi dalam tahun eksisting	0 1 Paket	2.100.500.000	DAU	0 1 Paket			
1.03.03.2.01.11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi	1 Kegiatan	125.000.000		1 Kegiatan			
1.03.03.2.01.17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Akses Air Bersih yang dibangun dalam Kondisi Baik dan Berfungsi dalam tahun eksisting	0 Rumah Tangga 1 Paket	14.945.200.000	DAU	0 Rumah Tangga 1 Paket			
1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Akses Air Bersih yang dibangun dalam Kondisi Baik dan Berfungsi dalam tahun eksisting	-	21.459.275.000	DAU	0			
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Pengelolaan Persampahan		5.368.080.000					
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Yang Dibangun Dalam Kondisi Baik dan Berfungsi		5.368.080.000					
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah yang dibangun TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1 Paket	5.368.080.000	DAU				
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik		30.006.980.000					
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik		30.006.980.000					



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Dalam Setahun	1 Kegiatan 0 Dokumen	500.000.000	DAU	1 Kegiatan 0 Dokumen			
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Sarana dan Prasarana Sanitasi yang dibangun dalam Kondisi Baik dan Berfungsi dalam tahun eksisting	0 Rumah Tangga 352 Unit	29.206.980.000	DAU	0 Rumah Tangga 352 Unit			
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi	0 Kelompok	300.000.000	DAU	0 Kelompok	128.460.000	DAU	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Genangan Air Yang Ditangani		3.615.490.000			2.606.650.000		
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang dbangun		3.615.490.000			2.606.650.000		
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah saluran drainase yang dbangun			DAU	0 M	508.500.000	DAU	
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah saluran drainase yang dbangun	7 Paket	3.615.490.000	DAU	7 Paket	215.000.000	DAU	
1.03.06.2.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Jumlah saluran drainase yang dbangun			DAU	0 M	1.523.150.000	DAU	
1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Jumlah saluran drainase yang dbangun			DAU	0 M	360.000.000	DAU	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Penertiban IMB Yang Sesuai Dengan Peruntukannya					79.052.799.980		
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio bangunan yang memiliki PBG di Daerah Kabupaten/Kota		81.499.550.000			79.052.799.980		



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rasio bangunan yang memiliki IMB di Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen 300 Pertek	499.900.000	DAU	0 Dokumen 300 Pertek	295.025.000	DAU	
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten Yang di Bangunan	10 Unit 0 Dokumen	79.999.650.000	DAU	10 Unit 0 Dokumen	78.257.774.980	DAU	
1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten Yang dipelihara dan dirawat	0 Unit 3 Unit	1.000.000.000	DAU	0 Unit 3 Unit	500.000.000	DAU	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Titik Lokasi Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan		38.995.653.125			34.487.682.500		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Titik Lokasi yang mendapat intervensi penataan bangunan dan lingkungan.		38.995.653.125			34.487.682.500		
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan	8 Paket 0 Kawasan	2.564.250.000	DAU	8 Paket 0 Kawasan	2.226.550.000	DAU	
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi Pembangunan Jalan Lingkungan dan Fasilitas Umum di Daerah Kabupaten/Kota	160 Paket 0 Kawasan	35.082.490.125		160 Paket 0 Kawasan	31.211.132.500		
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Infrastruktur yang terpelihara	0 Kawasan	1.348.913.000	DAU	0 Kawasan	1.050.000.000	DAU	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap		349.265.398.00 0			76.417.058.180		
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan terbangun/ditangani		349.265.398.00 0			76.417.058.180		



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	2.650.000.000	DAU	5 Dokumen	400.000.000	DAU	
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Yang di Survey	1106.148 KM	1.229.074.000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	1106.148 KM	911.489.820	DAU	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang Ditangani	68.516 KM	264.537.824.000	DAU	68.516 KM	59.067.963.000	DAU	
1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang ditangani	33 KM	33.000.000.000	DAU	33 KM	1.539.000.000	DAU	
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	6 Unit	41.000.000.000	DAU	6 Unit	7.975.000.000	DAU	
1.03.10.2.01.21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang jalan yang dipelihara dan Jumlah jembatan yang dipelihara	2 KM	3.998.500.000	DAU	2 KM	4.615.986.000	DAU	
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Laporan Hasil Pengawasan Jalan/Jembatan	5 Dokumen	2.850.000.000	DAU	5 Dokumen	1.907.619.360	DAU	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Score Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Jasa Konstruksi		2.789.039.000			799.912.800		
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi		1.425.348.000			99.125.800		
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang di latih	0 Orang 240 Orang	1.251.348.000	DAU	0 Orang 240 Orang	68.125.800	DAU	
1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Tersertifikasi	240 Orang	174.000.000	DAU	240 Orang	31.000.000	DAU	
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan		8.400.000			8.400.000		



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

	Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota							
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terwujudnya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	12 Dokumen	8.400.000	DAU	12 Dokumen	8.400.000	DAU	
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		129.820.000			41.820.000		
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Terlaksananya Rapat Tim Pembina Jasa Konstruksi	2 Kegiatan	129.820.000		0 Orang 2 Kegiatan	41.820.000	DAU	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		1.225.471.000			650.567.000		
1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Desa yang dibina	22 Desa	248.922.000	DAU	22 Desa	228.030.000	DAU	
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Disain Mix Formula Beton, Aspal, Timbunan Pilihan dan Lapis Pondasi Agregat yang dibuat	150 Dokumen 0 Laporan	976.549.000	DAU	150 Dokumen 0 Laporan	422.537.000	DAU	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)		3.313.564.000			868.450.000		
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan RRTR yang di tetapkan		2.096.394.000			300.000.000		
1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW	1 Dokumen	872.589.000	DAU	1 Dokumen	100.000.000	DAU	
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	616.745.000	DAU	2 Dokumen	100.000.000	DAU	



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	0 Dokumen	607.060.000	DAU	0 Dokumen	100.000.000	DAU	
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		574.750.000			342.460.000		
1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	328.300.000	DAU	1 Dokumen	179.820.000	DAU	
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	246.450.000	DAU	2 Dokumen	162.640.000	DAU	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		511.820.000			4.800.000		
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	434.820.000	DAU				
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersediannya Data Sistem Informasi Penataan Ruang		77.000.000	DAU		4.800.000	DAU	
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		130.600.000			221.190.000		
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	130.600.000	DAU	1 Dokumen	221.190.000	DAU	



2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat di lihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2023 Kabupaten Kapuas Hulu

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/Volume	Catatan
1	2	4	3	5	6
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	DPUPR		
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPUPR		
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPUPR		
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	DPUPR		
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPUPR		
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPUPR		
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	DPUPR		
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPUPR		
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPUPR		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Dalam Kondisi Baik	DPUPR		



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang garis sungai rawan abrasi	DPUPR		
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Jaringan Irigasi yang direhabilitasi/dipelihara	DPUPR		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Akses Air Bersih Yang Dibangun Dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Pengelolaan Persampahan	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Yang Dibangun Dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Genangan Air Yang Ditangani	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang dibangun	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah Penertiban IMB Yang Sesuai Dengan Peruntukannya	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio bangunan yang memiliki PBG di Daerah Kabupaten/Kota	KAB.KAPUAS HULU		



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Titik Lokasi Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Titik Lokasi yang mendapat intervensi penataan bangunan dan lingkungan.	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan terbangun/ditangani	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Score Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Jasa Konstruksi	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan RRTR yang ditetapkan	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	KAB.KAPUAS HULU		
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	KAB.KAPUAS HULU		



***Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024***



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional Penataan Ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya, Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (UU 24/1992), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh Undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Kebijakan penataan ruang di Kabupaten Kapuas Hulu yang akan ditelaah karena memberikan dampak lingkungan, baik dampak positif maupun negatif yaitu :

1. Pelestarian kawasan hutan tropis dan keanekaragaman hayati.
2. Pengembangan instrumen ekonomi berbasis lingkungan.
3. Pembangunan koridor penghubung taman nasional, sistem transportasi dan telekomunikasi.



4. Ketahanan Pangan dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu berbasis agropolitan dan minapolitan berkelanjutan.
5. Pengembangan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral.
6. Penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.
7. Pengelolaan dan pengolahan limbah domestik serta perbaikan kualitas sanitasi lingkungan permukiman.
8. Penanganan kawasan rawan banjir dan kebakaran lahan gambut.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengembangan instrumen ekonomi berbasis lingkungan, meliputi :

1. Tidak mengeluarkan izin baru untuk segala kegiatan berskala besar seperti perkebunan, perusahaan HPH-HTI, dan pertambangan di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya di dalam dan disekitar kawasan hutan taman nasional dan hutan lindung;
2. Bagi izin yang telah dikeluarkan sebagaimana kegiatan tersebut, maka perlunya komitmen yang ketat dan legal sebagai sanksi bagi perusahaan tersebut;



3. Kewajiban untuk membentuk kawasan pelestarian (HCV : *high conservation value*) disetiap perusahaan tersebut, sehingga lahan yang telah diberi izin tersebut telah mencadangkan dan mengencave lahan pengusaan mereka sebagai lahan pelestarian biodiversitas;
4. Kebijakan ini dapat diperkuat dalam bentuk peraturan daerah sebagai payung hukum;
5. Penegakan hukum yang tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan perizinan yang berlaku dengan memberikan sanksi berupa denda yang besar dari pada nilai kerusakan lingkungan yang terjadi;
6. Memberikan insentif bagi perusahaan yang meminimalkan degradasi lingkungan, dan disinsentif bagi perusahaan yang melanggar aturan tersebut. insentif dan disinsentif ini dapat dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk perda;
7. Melakukan rehabilitasi hutan lindung berupa restorasi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah;



8. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan kawasan hutan lindung, serta melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar dengan memanfaatkan hutan lindung;
9. Mengelola kegiatan budidaya yang telah berlangsung dalam hutan lindung berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan;
10. Menerapkan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat di kawasan hutan lindung yang didalamnya terdapat deposit mineral atau sumber daya alam lainnya;
11. Melakukan analisis ekonomi lingkungan untuk studi kelayakan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat;
12. Pemindahan dengan penggantian oleh pemerintah secara bertahap, terhadap kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan taman nasional, namun mengganggu fungsi kawasan;
13. Kegiatan yang diperkenankan adalah perlindungan plasma nutfah, wisata dan pos pengawas, yang pengelolaannya diupayakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu ekosistem yang dilindungi.



Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pembangunan koridor penghubung taman nasional, sistem transportasi, dan telekomunikasi, meliputi :

1. Melakukan kajian tentang perilaku hidup satwa liar, terutama bagi satwa liar yang dilindungi. hal ini berimplikasi pada kajian mendalam dan terperinci;
2. Perlunya kajian dan perhitungan yang komprehensif dan cermat, terutama kaitannya dengan biaya dan waktu, serta dampak terhadap ekosistem sekitarnya;
3. Perlu pengawasan dan penjagaan yang tinggi, terutama melibatkan masyarakat sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap kegiatan *illegal*, khususnya *illegal logging*;
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dengan memberikan insentif bagi kesejahteraan mereka, misalnya dalam pembuatan hutan desa yang dapat memenuhi kebutuhan kayu untuk kepentingan lokal semata;
5. Peningkatan kapasitas masyarakat dengan memfasilitasi kelembagaan masyarakat dengan mengadopsi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat setempat;
6. Adanya perda yang memayungi hukum kelembagaan masyarakat tersebut sebagai suatu upaya peningkatan



partisipatif masyarakat dalam mengaplikasikan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan;

7. Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif, hutan dan perkebunan dengan melakukan kajian penentuan outlet.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam ketahanan pangan dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu (kapet) berbasis agropolitan dan minapolitan berkelanjutan, meliputi :

1. Pengetatan pemberian izin bagi permukiman terutama bagi permukiman yang mengakibatkan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman;
2. Penetapan dan pengaturan zonasi bagi permukiman baru di kawasan agro - minapolitan, yang tentunya berbeda dengan aturan zonasi di luar kawasan agro - minapolitan, yang dapat ditindak lanjutkan dengan pembuatan perda sebagai payung hukum;
3. Upaya diversifikasi usaha agro dan mina untuk mengurangi resiko serangan wabah penyakit pada spesies agro - mina tertentu, yang berimplikasi pada kegagalan panen dan kerugian ekonomi;



4. Dilarang melakukan kegiatan pembangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan di sempadan sungai;
5. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, permukiman atau kegiatan lain yang mengganggu kelestarian sempadan kawasan;
6. Perlunya dibuat lembaga riset / penelitian untuk mengkaji kesesuaian jenis spesies ekonomi pada kawasan agro dan mina politan baik tanaman maupun perikanannya, serta kegiatan industri turunannya;
7. Pemberian penyuluhan bagi petani dan nelayan sebagai transfer ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. Optimalisasi pemanfaatan hutan produksi bagi perekonomian wilayah, dengan menjaga kelestarian dan keberlanjutan kawasan hutan tersebut;
9. Menjaga hutan agar tidak terganggu oleh kegiatan - kegiatan yang dapat merusak kawasan hutan produksi yang menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan di sekitarnya;
10. Mendorong kegiatan rehabilitasi dan reboisasi untuk menjaga kelangsungan fungsi hutan produksi dalam jangka panjang;



11. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan hutan produksi;
12. Industri yang berada di dalam kawasan industri menggunakan teknologi yang ramah lingkungan;
13. Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif dan kawasan hutan untuk lokasi perwujudan kawasan peruntukkan industri.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengembangan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral, meliputi :

- 1) Membuat peraturan daerah sebagai payung hukum dengan berbagai macam aturan yang ketat tentang usaha pertambangan
- 2) Pengkajian secara rinci dan mendalam mengenai kajian lingkungan, teknis dan ekonomis bagi perusahaan pertambangan
- 3) Pencabutan izin usaha pertambangan bagi perusahaan yang melanggar aturan dan merusak lingkungan
- 4) Disintensif bagi perusahaan tambang yang merusak lingkungan atau yang tidak sesuai aturan

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, meliputi :



- 1) Setiap kebijakan atau program yang dibuat setiap instansi atau sektor harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah.
- 2) Pengintegrasian kepentingan semua sektor, sehingga ada penghematan anggaran dan sumberdaya alam
- 3) Program - program kerja di instansi yang tidak sesuai dengan RTRW, RPJP, dan RPJM harus direvisi ulang.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik serta perbaikan kualitas sanitasi lingkungan permukiman, meliputi :

1. Kajian mendalam, komprehensif dan terperinci tentang pengolahan limbah dan sanitasi lingkungan terutama kajian lingkungannya;
2. Penetapan zona pengelolaan limbah domestik;
3. Penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
4. Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif pembangunan TPA sistem sanitary landfill;
5. Pembangunan lokasi TPA jauh dari pusat - pusat permukiman.
6. Pnaatan penerapan prosedur standar operasi TPA sistem sanitary landfill.



7. Disediakkannya sumur control disekitar kawasan TPA untuk mengetahui apakah air tanah disekitar kawasan tidak atau telah tercemar.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam penanganan kawasan rawan banjir dan kebakaran lahan gambut, meliputi :

1. Kajian mendalam, komprehensif dan terperinci untuk relokasi permukiman terutama kajian lingkungan, teknis dan ekonominya.
2. Penzonasian lahan gambut yang terperinci dan akurat di Kapuas Hulu akan meminimalisir kerusakan lahan gambut serta penentuan teknik pengelolaan yang lebih tepat untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penzonasian lahan gambut akan melestarikan fungsi ekologi gambut : carbon sink, reservoir air, dan penyerap air lahan gambut yang lestari merupakan wadah (pool) bagi simpanan karbon (carbon sink).

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor kunci keberhasilan organisasi. tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil.



dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasyarakat. dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistie.

Adapun tujuan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah meningkatnya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan Indikator Kinerja Sasaran yaitu Nilai Reformasi Birokrasi (RB).

Sasaran merupakan internal dalam proses perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai yang berorientasi pada hasil dan dapat dicapai pada periode tertentu. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Selama 5 (Lima) tahun periode 2021-2026 juga disertai dengan Indikator Kinerja Sasaran. Indikator Kinerja Sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan barometer/ tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai visi dan misi.



3.3. Program Dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu maka ditunjang dengan adanya Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan tupoksi SKPD. Adapun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu di tahun anggaran 2024 ditunjang dengan 9 (Sembilan) Program, 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan dan 78 (Tujuh Puluh Delapan) Sub Kegiatan, yang masing-masing memiliki sasaran kinerja.

Berikut ini Tabel Rumusan Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 :



Tabel 5

Rumusan Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		RANCANGAN AWAL				RANCANGAN AKHIR			
				Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	-	-		25.187.660.76 0,00		25.291.760.76 0,00		233.859.458.4 87,00		35.831.893.90 6,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN DIDALAM PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-		25.187.660.76 0,00		25.291.760.76 0,00		233.859.458.4 87,00		35.831.893.90 6,00
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K	-	(%)		20.283.547.68 0,00		20.062.347.68 0,00		19.064.639.64 3,00		22.073.793.90 6,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

	OTA										
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	(%)		89.550.000,00		89.550.000,00		24.850.000,00		89.550.000,00
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Dok.)	8 (Dok.)	25.250.000,00	8 (Dok.)	25.250.000,00	8 Dokumen	5.700.000,00	8 Dokumen	25.250.000,00
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Dok.)	1 (Dok.)	9.750.000,00	1 (Dok.)	9.750.000,00	1 Dokumen	3.525.000,00	1 Dokumen	9.750.000,00
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Dok.)	1 (Dok.)	7.500.000,00	1 (Dok.)	7.500.000,00	1 Dokumen	2.525.000,00	1 Dokumen	7.500.000,00
1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	(Dok.)	1 (Dok.)	9.750.000,00	1 (Dok.)	9.750.000,00	1 Dokumen	3.525.000,00	1 Dokumen	9.750.000,00
1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	(Dok.)	1 (Dok.)	7.500.000,00	1 (Dok.)	7.500.000,00	1 Dokumen	2.525.000,00	1 Dokumen	7.500.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

		DPA-SKPD									
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Laporan)	2 (Laporan)	4.550.000,00	2 (Laporan)	4.550.000,00	2 Laporan	1.350.000,00	2 Laporan	4.550.000,00
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Laporan)	4 (Laporan)	25.250.000,00	4 (Laporan)	25.250.000,00	4 Laporan	5.700.000,00	4 Laporan	25.250.000,00
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	(%)		9.622.493.880,00		9.622.493.880,00		8.124.527.335,00		9.833.940.105,00
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(Orang/bulan)	69 (Orang/bulan)	6.987.523.880,00	69 (Orang/bulan)	6.987.523.880,00	69 Orang/bulan	6.898.547.335,00	69 Orang/bulan	7.198.970.105,00
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	(Dok.)	1 (Dok.)	10.000.000,00	1 (Dok.)	10.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Dok.)	1 (Dok.)	2.554.120.000,00	1 (Dok.)	2.554.120.000,00	1 Dokumen	1.206.220.000,00	1 Dokumen	2.554.120.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

	SKPD										
1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	(Dok.)	1 (Dok.)	16.800.000,00	1 (Dok.)	16.800.000,00	1 Dokumen	1.500.000,00	1 Dokumen	16.800.000,00
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Laporan)	1 (Laporan)	20.300.000,00	1 (Laporan)	20.300.000,00	1 Laporan	6.420.000,00	1 Laporan	20.300.000,00
1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	(Dok.)	1 (Dok.)	8.000.000,00	1 (Dok.)	8.000.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	8.000.000,00
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Laporan)	18 (Laporan)	25.750.000,00	18 (Laporan)	25.750.000,00	18 Laporan	6.840.000,00	18 Laporan	25.750.000,00
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	(%)		21.725.000,00		21.725.000,00		5.840.000,00		21.725.000,00
1.03.01.2.03.	Penatausahaan Barang Milik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang	(Laporan)	1		1		1	5.840.000,00	1	21.725.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

0006	Daerah pada SKPD	Milik Daerah pada SKPD		(Laporan)	21.725.000,00	(Laporan)	21.725.000,00	Laporan		Laporan	
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	(%)		555.718.000,00		555.718.000,00		606.013.000,00		855.718.000,00
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	(Paket)					-	70.250.000,00	-	300.000.000,00
1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(Dok.)	1 (Dok.)	25.450.000,00	1 (Dok.)	25.450.000,00	1 Dokumen	6.840.000,00	1 Dokumen	25.450.000,00
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	(Orang)	30 (Orang)	530.268.000,00	30 (Orang)	530.268.000,00	30 Orang	528.923.000,00	30 Orang	530.268.000,00
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	(%)		3.567.764.920,00		3.567.764.920,00		3.028.077.100,00		3.567.764.920,00
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	(Paket)	1 (Paket)	56.985.000,00	1 (Paket)	56.985.000,00	1 Paket	49.210.000,00	1 Paket	56.985.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(Paket)	1 (Paket)	495.000.000,00	1 (Paket)	495.000.000,00	1 Paket	293.430.000,00	1 Paket	495.000.000,00
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	(Paket)	1 (Paket)	67.709.600,00	1 (Paket)	67.709.600,00	1 Paket	56.371.600,00	1 Paket	67.709.600,00
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	(Paket)	1 (Paket)	123.237.500,00	1 (Paket)	123.237.500,00	1 Paket	124.987.500,00	1 Paket	123.237.500,00
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	(Dok.)	1 (Dok.)	49.200.000,00	1 (Dok.)	49.200.000,00	1 Dokumen	134.700.000,00	1 Dokumen	49.200.000,00
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Laporan)	1 (Laporan)	2.754.597.820,00	1 (Laporan)	2.754.597.820,00	1 Laporan	2.363.538.000,00	1 Laporan	2.754.597.820,00
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(Dok.)	1 (Dok.)	21.035.000,00	1 (Dok.)	21.035.000,00	1 Dokumen	5.840.000,00	1 Dokumen	21.035.000,00
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	(%)		221.200.000,00		-		1.467.730.000,00		1.500.000.001,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	(Unit)	2 (Unit)	74.000.000,00	0 (Unit)	-	2 Unit	1.118.880.000,00	2 Unit	0,00
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	(Unit)	18 (Unit)	147.200.000,00	18 (Unit)	-	-	0,00	-	1.000.000.000,00
1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	(Unit)		4.748.019.480,00		4.748.019.480,00	-	99.000.000,00	-	500.000.001,00
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	(Unit)	1 (Laporan)	20.000.000,00	1 (Laporan)	20.000.000,00	18 Unit	249.850.000,00	18 Unit	0,00
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	(%)	1 (Laporan)	340.601.400,00	1 (Laporan)	340.601.400,00		4.367.037.208,00		4.748.019.480,00
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(Laporan)					1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	(Laporan)					1 Laporan	270.600.000,00	1 Laporan	340.601.400,00
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	(Laporan)	1 (Laporan)	4.387.418.080,00	1 (Laporan)	4.387.418.080,00	1 Laporan	4.066.437.208,00	1 Laporan	4.387.418.080,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	(%)		1.457.076.400,00		1.457.076.400,00		1.440.565.000,00		1.457.076.400,00
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	(Unit)	18 (Unit)	1.342.976.400,00	18 (Unit)	1.342.976.400,00	18 Unit	1.295.915.000,00	18 Unit	1.342.976.400,00
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	(Unit)	160 (Unit)	114.100.000,00	160 (Unit)	114.100.000,00	160 Unit	144.650.000,00	160 Unit	114.100.000,00
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luasan Daerah Irigasi Yang Ditangani	(%)		1.520.000.000,00		1.540.000.000,00		5.229.624.598,00		1.540.000.000,00
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot	-	(M)		280.000.000,00		290.000.000,00		400.000.000,00		290.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

	a										
1.03.02.2.01.0086	Revitalisasi Danau	Jumlah Danau yang Direvitalisasi	(Danau)	0 (Danau)	-	1 (Danau)	10.000.000,00	0 Danau	0,00	0 Danau	10.000.000,00
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	(KM)	4 (KM)	10.000.000,00	3 (KM)	10.000.000,00	4 KM	0,00	4 KM	10.000.000,00
1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	(KM)	0,2 (KM)	20.000.000,00	0,5 (KM)	20.000.000,00	0,2 KM	0,00	0,2 KM	20.000.000,00
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	(KM)	1,3 (KM)	20.000.000,00	1,5 (KM)	20.000.000,00	1,3 KM	0,00	1,3 KM	20.000.000,00
1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	(KM)	0,002 (KM)	200.000.000,00	0,002 (KM)	200.000.000,00	0,002 KM	400.000.000,00	0,002 KM	200.000.000,00
1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	(Unit)	1 (Unit)	10.000.000,00	1 (Unit)	10.000.000,00	1 Unit	0,00	1 Unit	10.000.000,00
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	(Unit)	2 (Unit)	20.000.000,00	3 (Unit)	20.000.000,00	2 Unit	0,00	2 Unit	20.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi	(Ha)		1.240.000.000,00		1.250.000.000,00		4.829.624.598,00		1.250.000.000,00
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	(KM)	2 (KM)	50.000.000,00	3 (KM)	60.000.000,00	2 KM	0,00	2 KM	60.000.000,00
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	(KM)	3 (KM)	500.000.000,00	3 (KM)	500.000.000,00	3 KM	3.976.820.198,00	3 KM	500.000.000,00
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	(KM)	1 (KM)	100.000.000,00	3 (KM)	100.000.000,00	1 KM	642.804.400,00	1 KM	100.000.000,00
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	(KM)	4 (KM)	100.000.000,00	5 (KM)	100.000.000,00	4 KM	210.000.000,00	4 KM	100.000.000,00
1.03.02.2.02.0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	(KM)	6 (KM)	400.000.000,00	3 (KM)	400.000.000,00	6 KM	0,00	6 KM	400.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	(Dok.)	2 (Dok.)	90.000.000,00	2 (Dok.)	90.000.000,00	2 Dokumen	0,00	2 Dokumen	90.000.000,00
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum	(%)		930.000.000,00		1.130.000.000,00		11.184.965.000,00		1.195.100.000,00
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Air Minum Dalam Tahun Eksisting	(SR)		930.000.000,00		1.130.000.000,00		11.184.965.000,00		1.195.100.000,00
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	(Unit)	2 (Unit)	30.000.000,00	2 (Unit)	30.000.000,00	2 Unit	7.083.000,00	2 Unit	30.000.000,00
1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	(Orang)	200 (Orang)	90.000.000,00	220 (Orang)	90.000.000,00	200 Orang	40.010.000,00	200 Orang	90.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

	dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Penyediaan Air Minum (SPAM)									
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	(Dok.)	1 (Dok.)	150.000.000,00	1 (Dok.)	150.000.000,00	1 Dokumen	219.690.000,00	1 Dokumen	215.100.000,00
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	(Liter/Detik)		80.000.000,00		80.000.000,00	2 - 2,5 Liter/Detik	2.499.549.000,00	2 - 2,5 Liter/Detik	80.000.000,00
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	(Liter/Detik)		100.000.000,00		100.000.000,00	2 - 2,5 Liter/Detik	4.744.045.000,00	2 - 2,5 Liter/Detik	100.000.000,00
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	(Unit)	3 (Unit)	300.000.000,00	5 (Unit)	500.000.000,00	3 Unit	286.280.000,00	3 Unit	500.000.000,00
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan	(SR)	1000 (SR)	180.000.000,00	1100 (SR)	180.000.000,00	1000 SR	3.388.308.000,00	1000 SR	180.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

	Perpipaan	Perpipaan									
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	(%)		30.000.000,00		30.000.000,00		0,00		30.000.000,00
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	(KK)		30.000.000,00		30.000.000,00		0,00		30.000.000,00
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	(Ton/hari)	0,6 (Ton/hari)	30.000.000,00	0,91 (Ton/hari)	30.000.000,00	0,6 Ton/hari	0,00	0,6 Ton/hari	30.000.000,00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	(%)		340.000.000,00		340.000.000,00		7.988.626.000,00		340.000.000,00
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Pengolahan Air Limbah Domestik Dalam Tahun Eksisting	(KK)		340.000.000,00		340.000.000,00		7.988.626.000,00		340.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

	Kabupaten/Kota										
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	(Rumah Tangga)	400 (Rumah Tangga)	150.000.000,00	400 (Rumah Tangga)	150.000.000,00	400 Rumah Tangga	7.668.826.000,00	400 Rumah Tangga	150.000.000,00
1.03.05.2.01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	(Orang)	200 (Orang)	90.000.000,00	200 (Orang)	90.000.000,00	200 Orang	43.800.000,00	200 Orang	90.000.000,00
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	(Dok.)	1 (Dok.)	100.000.000,00	1 (Dok.)	100.000.000,00	1 Dokumen	276.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	-	(%)		280.000.000,00		220.000.000,00		1.161.165.000,00		240.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

	DRAINASE										
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	(M)		280.000.000,00		220.000.000,00		1.161.165.000,00		240.000.000,00
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	(M)	500 (M)	10.000.000,00	0 (M)	-	500 M	0,00	500 M	0,00
1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	(Meter)	6000 (Meter)	200.000.000,00	3000 (Meter)	200.000.000,00	6000 Meter	0,00	6000 Meter	200.000.000,00
1.03.06.2.01.0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	(Sistem Drainase Lingkungan)	1 (Sistem Drainase Lingkungan)	20.000.000,00	0 (Sistem Drainase Lingkungan)	-	1 Sistem Drainase Lingkungan	935.030.000,00	1 Sistem Drainase Lingkungan	0,00
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	(Sistem Drainase Perkotaan)	7 (Sistem Drainase Perkotaan)	20.000.000,00	0 (Sistem Drainase Perkotaan)	-	7 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	7 Sistem Drainase Perkotaan	20.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	(Sistem Drainase Perkotaan)	2 (Sistem Drainase Perkotaan)	10.000.000,00	3 (Sistem Drainase Perkotaan)	10.000.000,00	2 Sistem Drainase Perkotaan	226.135.000,00	2 Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000,00
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	(Sistem Drainase Perkotaan)	3 (Sistem Drainase Perkotaan)	20.000.000,00	1 (Sistem Drainase Perkotaan)	10.000.000,00	3 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	3 Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000,00
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	(%)		1.320.000.000,00		1.320.000.000,00		35.649.800.000,00		1.293.000.000,00
1.03.08.2.01	Penyelenggaraa n Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kot a, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	(%)		1.320.000.000,00		1.320.000.000,00		35.649.800.000,00		1.293.000.000,00
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaia n Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	(Banguna n Gedung)	10 (Banguna n Gedung)	1.000.000.000,00	10 (Banguna n Gedung)	1.000.000.000,00	10 Banguna n Gedung	34.008.900.000,00	10 Banguna n Gedung	1.000.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	(Bangunan Gedung)	3 (Bangunan Gedung)	150.000.000,00	3 (Bangunan Gedung)	150.000.000,00	3 Bangunan Gedung	309.970.000,00	3 Bangunan Gedung	150.000.000,00
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	(Dok.)	1 (Dok.)	30.000.000,00	1 (Dok.)	30.000.000,00	1 Dokumen	15.200.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	(Dok.)	3 (Dok.)	90.000.000,00	3 (Dok.)	90.000.000,00	3 Dokumen	1.240.000.000,00	3 Dokumen	90.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.08.2.01.0023	Penyelenggara n Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	(Dok.)	100 (Dok.)	50.000.000,00	100 (Dok.)	50.000.000,00	100 Dokumen	75.730.000,00	100 Dokumen	50.000.000,00
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGA RAAN JALAN	Meningkatnya Kualitas Jalan	(%)		6.880.000.000,00		7.080.000.000,00		152.675.880.746,00		7.080.000.000,00
1.03.10.2.01	Penyelenggara n Jalan Kabupaten/Kot a	Panjang Jalan Yang Ditangani	(KM)		6.880.000.000,00		7.080.000.000,00		152.675.880.746,00		7.080.000.000,00
1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	(Dok.)	1 (Dok.)	100.000.000,00	1 (Dok.)	100.000.000,00	1 Dokumen	377.856.980,00	1 Dokumen	100.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraa n Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	(Dok.)	6 (Dok.)	200.000.000,00	6 (Dok.)	200.000.000,00	6 Dokumen	2.250.000.000,00	6 Dokumen	200.000.000,00
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraa n Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya	(KM)	2 (KM)	200.000.000,00	2 (KM)	200.000.000,00	2 KM	2.726.451.375,00	2 KM	200.000.000,00
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	(Jembata n)	4 (Jembata n)	400.000.000,00	4 (Jembata n)	400.000.000,00	4 Jembata n	2.218.185.000,00	4 Jembata n	400.000.000,00
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	(KM)	0,23 (KM)	580.000.000,00	0,23 (KM)	580.000.000,00	0,23 KM	13.823.867.840,00	0,23 KM	580.000.000,00
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	(KM)	0,5 (KM)	1.100.000.000,00	0,5 (KM)	1.100.000.000,00	0,5 KM	121.207.965.645,00	0,5 KM	1.100.000.000,00
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	(KM)	1 (KM)	200.000.000,00	1 (KM)	200.000.000,00	1 KM	0,00	1 KM	200.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	(Jembatan)	50 (Jembatan)	2.000.000.000,00	25 (Jembatan)	2.000.000.000,00	10 Jembatan	3.200.930.000,00	10 Jembatan	2.000.000.000,00
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	(Jembatan)	8 (Jembatan)	400.000.000,00	10 (Jembatan)	500.000.000,00	8 Jembatan	486.280.000,00	8 Jembatan	500.000.000,00
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	(Jembatan)	6 (Jembatan)	100.000.000,00	4 (Jembatan)	100.000.000,00	6 Jembatan	4.250.000.000,00	6 Jembatan	100.000.000,00
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	(KM)	1106,148 (KM)	100.000.000,00	1106,148 (KM)	100.000.000,00	1106,148 KM	800.000.000,00	1106,148 KM	100.000.000,00
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	(KM)	1 (KM)	300.000.000,00	2 (KM)	400.000.000,00	1 KM	228.500.000,00	1 KM	400.000.000,00
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	(KM)	20 (KM)	1.200.000.000,00	10 (KM)	1.200.000.000,00	4 KM	1.105.843.906,00	4 KM	1.200.000.000,00
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	(Score)		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		401.937.500,00		1.040.000.000,00
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	(%)		300.000.000,00		300.000.000,00		99.830.000,00		300.000.000,00
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang	(Orang)	120 (Orang)	100.000.000,00	120 (Orang)	100.000.000,00	120 Orang	1.000.000,00	120 Orang	100.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

	Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analisis	Difasilitasi Sertifikasi									
1.03.11.2.01.0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analisis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	(Dok.)	1 (Dok.)	100.000.000,00	1 (Dok.)	100.000.000,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	100.000.000,00
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analisis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	(Orang)	120 (Orang)	100.000.000,00	120 (Orang)	100.000.000,00	120 Orang	98.830.000,00	120 Orang	100.000.000,00
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	(%)		200.000.000,00		200.000.000,00		4.900.000,00		200.000.000,00
1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan	(Orang)	2 (Orang)	100.000.000,00	2 (Orang)	100.000.000,00	2 Orang	4.900.000,00	2 Orang	100.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

	SIPJAKI	Kapasitasnya			0		0				
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	(Layanan Informasi)	12 (Layanan Informasi)	100.000.000,00	12 (Layanan Informasi)	100.000.000,00	12 Layanan Informasi	0,00	12 Layanan Informasi	100.000.000,00
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	-	(%)		200.000.000,00		200.000.000,00		41.820.000,00		200.000.000,00
1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	(Dok.)	5 (Dok.)	100.000.000,00	5 (Dok.)	100.000.000,00	5 Dokumen	41.820.000,00	5 Dokumen	100.000.000,00
1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	(Dok.)	1 (Dok.)	100.000.000,00	1 (Dok.)	100.000.000,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	100.000.000,00
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	(%)		300.000.000,00		300.000.000,00		255.387.500,00		340.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	(Paket Pekerjaan)	100 (Paket Pekerjaan)	100.000.000,00	100 (Paket Pekerjaan)	100.000.000,00	100 Paket Pekerjaan	124.532.500,00	100 Paket Pekerjaan	100.000.000,00
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	(Lembaga)	22 (Lembaga)	100.000.000,00	22 (Lembaga)	100.000.000,00	22 Lembaga	100.055.000,00	22 Lembaga	100.000.000,00
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	(Badan Usaha)					5 Badan Usaha	30.800.000,00	5 Badan Usaha	40.000.000,00
1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	(Dok.)	1 (Dok.)	100.000.000,00	1 (Dok.)	100.000.000,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	100.000.000,00
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Jumlah Penyusunan RDTR	(%)		1.000.000.000		1.000.000.000		502.820.000,00		1.000.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

	PENATAAN RUANG				,00		,00				
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	(Dok.)		300.000.000,00		300.000.000,00		160.000.000,00		200.000.000,00
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	(Dok.)	1 (Dok.)	100.000.000,00	1 (Dok.)	100.000.000,00		24.950.000,00		250.000.000,00
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	(Dok.)	1 (Dok.)	100.000.000,00	1 (Dok.)	100.000.000,00	1 Dokumen	160.000.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00
1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	(Dok.)	1 (Dok.)	100.000.000,00	1 (Dok.)	100.000.000,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	100.000.000,00
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	-	(Dok.)		250.000.000,00		250.000.000,00				



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

	Kabupaten/Kota										
1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	(Dok.)	1 (Dok.)	150.000.000,00	1 (Dok.)	150.000.000,00	1 Dokumen	24.950.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00
1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	(Dok.)	1 (Dok.)	100.000.000,00	1 (Dok.)	100.000.000,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	100.000.000,00
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	(Dok.)						99.950.000,00		100.000.000,00
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	(Dok.)					1 Dokumen	99.950.000,00	1 Dokumen	100.000.000,00
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	(Dok.)		450.000.000,00		450.000.000,00		217.920.000,00		450.000.000,00



Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	(Dok.)	1 (Dok.)	450.000.000,00	1 (Dok.)	450.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	450.000.000,00
1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	(Laporan)					1 Laporan	157.920.000,00	1 Laporan	0,00
		TOTAL			25.187.660.760,00		25.291.760.760,00		233.859.458.487,00		35.831.893.906,00



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan Rencana Pendanaan Perangkat Daerah disusun berdasarkan hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif rancangan Renstra Perangkat Daerah. Program RENJA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini ditujukan untuk akselerasi pencapaian target-target sasaran yang telah ditetapkan didalam RENSTRA, sehingga antara visi dan misi tetap selaras.

Pagu indikatif adalah merupakan besaran rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif di alokasikan kesetiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. Sumber pembiayaan untuk isu-isu strategis adalah dengan menggunakan Dana ALokasi Umum (DAU) sebesar **135.365.437.487,00** dan Dana ALokasi Khusus (DAK) sebesar **113.091.478.000,00**.



BAB V PENUTUP

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan administrasi pemerintah yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara profesional, efisien, efektif serta tanggungjawab terhadap aspirasi masyarakat dan pihak-pihak yang dilayani.

Tingkat keberhasilan pembangunan di kabupaten Kapuas Hulu sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kejujuran dan keterbukaan dalam melaksanakan program pembangunan yang telah dirumuskan.

Putussibau, Desember 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu

MARTHEN,S.T.,M.T.
NIP. 19740923 200502 1 002